



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 26 Maret 2021

Halaman: 1

INSENTIF NAKES NUNGGAK Rp39 MILIAR

JOGJA—Pemerintah kabupaten/kota di DIY menunggak pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp39 miliar.

Dana untuk pemberian insentif itu sudah disediakan oleh masing-masing pemda lewat *refocusing* anggaran, tetapi pencairannya masih menunggu aturan dari Pemerintah Pusat.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Beny Suharsono mengakui tunggakan insentif terjadi di kabupaten/kota di DIY dengan total Rp39 miliar. Namun dia meyakini pemerintah kabupaten dan kota sudah berkomitmen mencairkan dana insentif tersebut.

Menurut Beny insentif nakes tidak mungkin terpengang *refocusing* anggaran karena masuk dalam pos anggaran belanja wajib sehingga tidak mungkin terkena *refocusing*. "Cuma memang anggarannya terbatas sehingga ada yang ditunda dan pembayarannya bertahap," ujar Beny, Kamis (25/3).

Beny mengklaim tidak ada tunggakan insentif untuk tenaga kesehatan di bawah Pemda DIY. Adapun mengenai soal alokasi insentif nakes DIY, mantan Sekretaris DPRD DIY ini tidak hafal angkanya.

Insentif Nakes...

Sekda Bantul Helmi Jamharis menyatakan Pemkab telah menganggarkan Rp20 miliar dari total dana *refocusing* APBD 2021 senilai Rp144 miliar untuk pembayaran insentif nakes yang menangani Covid-19 pada 2020. "Awalnya mau dibayarkan oleh Pusat, tapi dalam perkembangannya ditanggung kabupaten," ucap Helmi, Kamis.

Helmi tidak merinci berapa banyak nakes yang akan menerima insentif tersebut. Namun, data di Dinkes Bantul mencatat ada 10.000 tenaga kesehatan yang diperkirakan mendapatkan insentif nakes 2020. "Total insentif yang belum dibayar tahun lalu mencapai Rp20 miliar," kata Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Budiraharja.

Selain membayar tunggakan insentif senilai Rp20 miliar untuk nakes, Pemkab juga menganggarkan Rp94 miliar untuk pendampingan vaksinasi dan penanganan Covid-19. "Sebanyak Rp94 miliar itu sudah mencakup biaya penanganan Covid-19, honor nakes, dukungan dan pendistribusian vaksin serta bantuan untuk selter. Ada insentif bagi tenaga medis untuk vaksinasi dan insentif tenaga medis untuk penanganan covid-19," ujar Helmi.

Tunggu Aturan

Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran sebesar Rp26.144.425.000 untuk insentif nakes. Alokasi ini bersumber dari kebijakan *refocusing* sebesar 8% dari dana alokasi umum (DAU) untuk penanggulangan Covid-19.

Kepala Bidang Anggaran, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Astuti Rahayu, mengatakan setelah *refocusing* anggaran, Pemkab menetapkan dana untuk insentif tenaga kesehatan.

Meski demikian, tambahan penghasilan untuk nakes belum bisa cair karena menunggu aturan dari Pemerintah Pusat tentang pemberian insentif. "Kami masih tunggu. Yang jelas sudah kami persiapkan," kata Tutik.

Menurut dia, besaran anggaran untuk insentif masih sebatas perkiraan karena dana disesuaikan dengan kebutuhan di tahun lalu. "Ya nanti kalau sudah ada aturannya tentang besaran insentif akan dilakukan penyesuaian," katanya.

Ditambahkannya, anggaran insentif yang disediakan berasal dari kebijakan *refocusing* yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. "Kami hitung 8% dari DAU besarnya mencapai Rp69.441.338.160. Pengalihan anggaran ini, salah satunya memberikan insentif bagi tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Irawaty, membenarkan adanya perubahan skema pemberian insentif untuk tenaga kesehatan. Pada awalnya, pemberian insentif ditanggung Pemerintah Pusat, tetapi saat ini kewenangan diberikan ke daerah. Disamping mengenai keterlambatan pemberian insentif, Dewi mengakui.

"Memang ada, tapi saya tidak hafal jumlahnya. Saya berharap (walau) adanya perpindahan kewenangan dari Pusat ke daerah pemberian insentif bisa lebih lancar," katanya.

Adapun, Dinkes Sleman enggan menanggapi masalah tunggakan penyaluran insentif bagi nakes. "Ngapunte, saya belum bisa menjawab terkait insentif nakes," kata Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo.

Baginya, persoalan insentif nakes cukup sensitif dan akan merembet kepada masalah lain. Padahal saat ini para tenaga medis juga masih menangani pasien Covid-19 dan berkonsentrasi menyelesaikan program vaksinasi. "Ini sangat sensitif," kata Joko.

Namun dalam wawancara pada Februari lalu, Joko mengakui adanya keterlambatan pembayaran insentif disebabkan masalah teknis-administratif. Salah satunya dipengaruhi adanya peraturan dari Pemerintah Pusat yang akan berubah. Adapun penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan disampaikan melalui rumah sakit masing-masing.

Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Aji Wibowo mengatakan Pemkab Sleman tetap menyediakan anggaran insentif bagi nakes yang menangani Covid-19 sesuai kewenangan Pemkab.

Penambahan Kasus

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY melaporkan terjadi penambahan kasus positif Covid-19 per Kamis sebanyak 258 kasus. Tambahan kasus ini membuat total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di DIY menjadi 32.312 kasus.

Penambahan kasus terbanyak ada di wilayah Sleman sebanyak (100 kasus), Bantul (58), Jogja (41), Kulonprogo (38), dan Gunungkidul (21).

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 DIY, Berty Murtiningsih, mengutarakan rincian riwayat sementara kasus terkonfirmasi Covid-19 berdasarkan dari pemeriksaan mandiri (35 kasus), penelusuran kontak kasus positif (184 kasus), *screening* karyawan kesehatan (1), perjalanan luar daerah (2) dan belum diketahui (36).

Pada hari yang sama Berty juga melaporkan terjadi penambahan kasus sembuh sebanyak 193 kasus yang tersebar di Bantul (67 kasus), Kulonprogo (58), Sleman (47), Gunungkidul (14), dan Jogja (7).

"Total sembuh menjadi 26.344 kasus," kata Berty.

Adapun kasus meninggal dunia di hari yang sama sebanyak satu orang, sehingga kasus meninggal dunia totalnya mencapai 765 orang. Menurut Berty satu kasus meninggal dunia adalah kasus 28.628, laki-laki, 70 tahun asal Sleman.

Berty juga melaporkan total kasus terkonfirmasi dari awal sampai sekarang sebanyak 32.312 orang. (Abdul Hamid Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005